

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUNGKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN NIAS SELATAN

Titisman daki¹ Anskaria s. Gohae² Jhon firman fau³

ABSTRAK

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi tentang analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis rasio dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2017. Hasil yang di dapatkan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun 2011-2017 dilihat dari rasio kemandirian keuangan sangat kurang mampu dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena berada pada kriteria $\leq 10\%$. Rasio ketergantungan keuangan daerah sangat kurang mampu karena berada pada kriteria $\leq 10\%$. Rasio derajat desentralisasi fisik sangat kurang mampu karena berada pada kriteria $\leq 10\%$. Rasio efektivitas keuangan cukup efektif karena berada pada kriteria $\leq 90\%$. Dan rasio efisiensi keuangan daerah sangat tidak efisien karena berada pada kriteria diatas 100%.

Kata Kunci: *Keuangan Daerah, Otonomi Daerah Dan Analisis Rasio Keuangan*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang yang terus melakukan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur maka seluruh potensi dan sumber daya yang ada harus di alokasikan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan undang-undang No 20 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan tonggak dimulainya otonomi daerah.

¹ Alumni Program Studi Manajemen STIE Nias Selatan (dakhititisman@gmail.com)

² Dosen Tetap STIE Nias Selatan (anskaria1867@gmail.com)

³ Dosen Tetap STIE Nias Selatan (jhontelda@gmail.com)

Sejak berlakunya undang-undang No 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, banyak aspek positif dalam pemberlakuan undang-undang tersebut. Otonomi daerah dapat membawa perubahan positif dalam hal kewenangan daerah dalam mengatur daerah sendiri. Kewenangan ini merupakan sebuah impian masyarakat, karena selama sistem pemerintah yang sentralisasi cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah termasuk masyarakat, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut, keuangan daerah adalah “ semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat di jadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Setiap Kabupaten yang diberikan otonomi diharapkan mampu mengelola keuangannya sendiri, guna mencapai tujuan dibentuknya otonomi daerah (OTODA) serta menggali PAD sesuai Undang-Undang yang berlaku supaya setiap daerah tidak bergantung pada dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 salah satu Kabupaten yang diberikan Otonomi Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humban Hasundutan. Dengan pemberian Otonomi ini, pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan mempunyai tanggungjawab penuh dalam mengurus dan mengatur daerahnya sendiri serta memiliki hak untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Nias Selatan harus mampu mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Untuk lebih jelas, berikut disajikan data rincian pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2011-2017?

Tabel 1.1
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011-2017 (ribu rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2011	23.030.719,00	399.717.262,00	68.706.079,00

2012	15.592.080,00	471.770.753,00	50.733.707,00
2013	32.087.688,00	550.041.053,00	44.448.567,00
2014	12.828.005,00	585.343.366,00	44.978.036,00
2015	15.037.043,00	629.933.510,00	169.924.679,00
2016	16.263.068,00	712.606.956,00	276.017.186,00
2017	18.450.267,00	768.617.878,00	339.495.324,00

Sumber: BPKPAD kab. Nisel 2019

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim sehingga Kabupaten Nias selatan masih bergantung pada Dana Perimbangan. Pada Tahun 2011-2012 PAD Kabupaten Nias Selatan mengalami penurunan sebesar 7.438.639 dimana pada tahun 2011 PAD nya sebesar 23.030.719,00 dan pada tahun 2012 PAD sebesar 15.592.080, tetapi pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan PAD yang mana besarnya adalah 32.087.688 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2014 sebesar 12.828.005, pada tahun 2015 sebesar 15.037.043, pada tahun 2016 sebesar 16.263.086 dan pada tahun 2017 sebesar 18.450.267. Jadi PAD kabupaten nias selatan berfluktuasi.

Tetapi dibandingkan dengan dana perimbangan bahwa setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar 399.717.262 dan sampai pada tahun 2017 sebesar 768.617.878. Sedangkan lain lain pendapatan yang sah memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan PAD yang mana pertumbuhannya juga setiap tahunnya meningkat. Jadi, berdasarkan data diatas bahwa Kabupaten Nias Selatan memiliki pendapatan asli daerah yang masih kecil.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan.

B. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Otonomi Daerah

Menurut Halim (2004:143), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal senada dikatakan Widjaja (2011:76) “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Jadi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan inisiatif, aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Konsep Keuangan Daerah

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam Abdul Halim, 2007). Sedangkan menurut Widjaja (2011:147) mengemukakan bahwa “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD”.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa keuangan daerah adalah segala bentuk hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Teoritis

Hubungan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

Menurut Halim (2012) mengatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus diupayakan seminimal mungkin. Artinya bahwa keuangan daerah merupakan pondasi atau dasar dari tercapainya pembangunan daerah otonomi yang lebih berdaya saing dan berpotensi.

Menurut Yuliati (2016:3) mengatakan bahwa “peranan keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa daerah yang diberikan kewenangan otonomi harus mampu mengelolah keuangannya sebagai perwujudan tercapainya tujuan pembentukan daerah otonomi. Kemampuan keuangan yang dimaksud

adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai rencana program pemerintah tanpa bergantung pada bantuan dana dari provinsi maupun dana dari pusat.

Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 "Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah". Sedangkan menurut Widjaja (2011:110) mengemukakan bahwa sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004) membedakan 2 faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk. Sedangkan faktor internalnya yaitu sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, system dan pelaporan. Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dimana faktor internal meliputi sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan sumber daya manusia, peraturan daerah, system dan pelaporan. Sedangkan faktor eksternal yaitu investasi, PDRB inflasi, dan jumlah penduduk.

Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

menurut widjaja (2011:76) tujuan dari otonomi daerah ini adalah "menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan". Hal senada juga dikemukakan oleh Halim (2014:25) mengatakan bahwa tujuan otonomi daerah terbagi dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan perwujudan demokrasi sistem pemerintah di daerah. Sedangkan dari kepentingan pemerintahan daerah tujuannya yaitu:

- a. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik lokal/daerah,
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan memperhatikan hak-hak masyarakat,
- c. Untuk mewujudkan lokal *responsiveness* yang artinya mempermudahantisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial.

Penelitian Terdahulu

Penelitian juga dilakukan Zai (2018) dengan judul “analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu rasio tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi fisik, rasio aktivitas, rasio efektivitas dan rasio keserasian. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu bahwa dengan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Barat dalam periode 5 tahun memiliki tingkat kemandirian dengan rata-rata 2,81%. Jika dibandingkan dengan tingkat kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Nias Barat sudah sangat baik (skala 0.00%-10,00%) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan tingkat ketergantungan daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berada pada rata-rata 53,31%. Jika dibandingkan dengan skala pengukuran maka kabupaten Nias Barat tergolong masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya. berdasarkan tingkat desentralisasi menunjukkan bahwa masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,14%. Berdasarkan rasio efektivitas menunjukkan bahwa sudah sangat efektif dengan rata-rata 0,93%. Berdasarkan rasio aktivitas, menunjukkan bahwa kabupaten Nias Barat menunjukkan bahwa perkembangannya positif dengan rata-rata 0.32%. Sedangkan berdasarkan rasio pertumbuhan masih belum mampu dan berdasarkan rasio keserasian menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Barat masih rendah dalam mendukung perkembangan kemampuan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus (2017) dengan judul “analisis tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan di kota Pamekasan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah. Hasil

analisis yang di peroleh yaitu : berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio dengan rata-ratanya adalah 36,53% masih berada diantara 25% - 50% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif. Sedangkan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukan bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Pamekasa masih sangat relatif rendah dalam pelaksanaan otonominya yang hanya memiliki rata-rata 6,4%. Sedangkan berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran langsung daerah rata-rata sebesar 19%, ini artinya ketergantungan kabupaten Pamekasan cukup besar karna masih dalam skala interval 10,01-20,00%. Hal ini berarti PAD memiliki ketergantungan cukup besar untuk membiayai pengeluaran langsung dan pemerintah Kabupaten Pamekasan masih tergantung pada sumber penerimaan keuangan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Penelitian juga dilakukan oleh Savitri (2015) dengan judul “analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun 2007-2011 di kota Makasar”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun 2007-2011 di kota Makasar. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2007-2011. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun terakhir yang menghasilkan jumlah rata-ratanya sebesar 18,30% dengan pola hubungan yang instruktif. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan angka rata-rata sebesar 15,39% dengan kemampuan keuangan yang tergolong masih kurang. Kemudian berdasarkan Rasio IKK menunjukan bahwa kota makasar masih tergolong belum mampu membiayai belanja rutin pemerintah dengan rata-rata 24,99% dengan pla kemampuan keuangan yang masih berada dalam interval 20,01% - 40,00% yang dinilai masih kurang. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian, pemerintah kota Makasar masih belum memprioritaskan belanja rutin dari pada belanja pembangunan. Hasil rata-rata rasio pembangunan sebesar 37,20% dan rasio belanja rutin sebesar 62,80%. Angka ini menunjukan bahwa pemerintah kota makasar belum memperhatikan pembangunan daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Desita (2015) dengan judul “analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kota Pekan Baru (2010-2014). Tujuan dari peneiltian ini adalah untuk melihat besar kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pekan Baru. Metode

analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif komparatif. Sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fisik, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah kota pekan baru masih sangat kurang dibuktikan dengan rasio IKK yang memiliki pola instruktif. Selanjutnya berdasarkan rasio derajat desentralisasi fisik, yang berada pada interval kurang yaitu sebesar 17,68%. Sedangkan berdasarkan rasio IKR yang berada pada skala kurang yaitu dengan rata-rata 37,01% yang berarti pemerintah masih belum mampu membiayai pengeluaran rutin yang di prioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas perangkat daerah Selanjutnya rasio keserasian dapat dikatakan hampir serasi karena kebutuhan belanja rutin dan belanja pembangunan sudah ada keseimbangan yaitu belanja rutin sebesar 47,16% dan belanja pembangunan 40,70%. Dan yang terakhir adalah rasio pertumbuhan, yang mana dapat disimpulkan Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan yang positif.

Penelitian juga dilakukan wurangian (2017) dengan judul “analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Tomohon tahun 2007-2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Tomohon. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Alat analisis yang digunakan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fisik, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa dilihat dari rasiokemandirian keuangan tahun 2007-2015 termasuk dalam pola hubungan instruktif, sedangkan berdasarkan rasio desentralisasi fisik menunjukkan bahwa daerah tomoho memiliki rata-rata skala interval 0,00% - 10%. Yang mana menunjukkan bahwa kota Tomoho masih kurang sehingga kota tomoho masih bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Berdasarkan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa kota tomohon masih sangat kurang dilihat dari PAD yang masih kecil, total penerima masih kurang, pembangunan masih juga kurang. Sehingga kota tomohon Masih kurang mampu dalam meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mengumpulkan laporan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017. Laporan keuangan yang di maksud adalah laporan realisasi anggaran (PAD dan laporan realisasi Belanja daerah).

Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis rasio. Dimana analisis rasio merupakan alat analisis untuk membandingkan kemampuan keuangan suatu daerah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 5 alat analisis yaitu:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan keuangan daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi}} \times 100\%$$

3. Rasio Derajat desentralisasi fisik

$$\text{Derajat Desentralisasi fisik} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi fisik, dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Desentralisasi Fisikal
0,00 – 10.0	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang
10,1 – 20.0	Kurang	Kurang	Kurang
20,1 – 30.0	Sedang	Sedang	Sedang
30,1 – 40.0	Cukup	Cukup	Cukup
40,1 – 50.0	Baik	Baik	Baik
>50,00	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

4. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio eferktivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}}$$

5. Rasio Efisiensi

$$\frac{\text{(Pengeluaran) Belanja}}{\text{Pendapatan}}$$

Rasio Efisien =

Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi keuangan daerah, dan efektivitas keuangan daerah, dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Efisiensi Pengolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria efektivitas	Kriteria efisiensi
Diatas 100%	Sangat Efektif	Tidak Efisien
90% - 100%	Efektif	Kuran Efisien
80% - 90%	Cukup Efektif	Cukup Efisien
60% -80%	Kurang Efektif	Efisien
Kurang dari 60%	Tidak Efektif	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang di peroleh, maka tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rasio Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2011-2017

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio	Tingkat Kemandirian
2011	23.030.717	399.717.262	5,762%	Sangat Kurang
2012	15.592.079	471.770.753	3,305%	Sangat Kurang
2013	32.087.696	550.041.052	5,834%	Sangat Kurang
2014	12.828.004	585.343.364	2,192%	Sangat Kurang
2015	15.037.041	629.933.514	2,387%	Sangat Kurang
2016	16.263.067	712.606.957	2,282%	Sangat Kurang
2017	18.450.267	768.617.877	2,400%	Sangat Kurang
Rata-rata			3,452%	Sangat Kurang

Sumber: data olahan penulis 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, tentang kemandirian Keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017 penulis membuat kesimpulan bahwa setiap tahunnya rasio kemandirian keuangan daerah berfluktuasi , dengan rata-rata kemandiriannya keuangan Kabupaten Nias Selatan selama tujuh (7) tahun atau periode 2011-2017 memiliki rasio kemandirian sebesar 3,452% dan berdasarkan kriteria kemandirian berada pada pola interval 0,00-10,0 (sangat kurang).

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang di peroleh, maka tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rasio Ketergantungan Keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2011-2017

Tahun	PAD	APBD Tanpa subsidi	Rasio	Tingkat ketergantungan keuangan
2011	23.030.719	91.718.794	25,110%	Sedang
2012	15.592.080	66.325.786	23,508%	Sedang
2013	32.087.699	76.536.253	41,925%	Baik
2014	12.828.005	57.801.040	22,191%	Sedang
2015	15.037.043	184.961.359	8,130%	Sangat Kurang
2016	16.263.068	292.561.453	5,502%	Sangat Kurang
2017	18.450.267	357.945.591	5,154%	Sangat Kurang
Rata-rata			18,789%	Kurang

Sumber: data olahan penulis 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, tentang rasio ketergantungan Keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017 penulis membuat kesimpulan bahwa setiap tahunnya rasio kemandirian ketergantungan keuangan daerah mengalami penurunan rasio , sehingga memiliki rata-rata ketergantungan keuangan Kabupaten Nias Selatan selama tujuh (7) tahun atau periode 2011-2017 memiliki rasio kemandirian sebesar 3,452% dan berdasarkan kriteria kemandirian berada pada pola interval 0,00-10,0 (sangat kurang).

Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal

Berdasarkan Dari hasil penelitian, dapat dilihat rasio desentralisasi fisikal Kabupaten Nias Selatan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2011-2017

Tahun	PAD	Total Penerimaan Daerah (TPD)	Rasio	Tingkat Kemampuan keuangan daerah
2011	23.030.717	491.426.056	4,686%	Sangat Kurang
2012	15.592.079	538.096.539	2,898%	Sangat Kurang
2013	32.087.686	626.577.305	5,121%	Sangat Kurang
2014	12.828.004	643.149.044	1,995%	Sangat Kurang
2015	15.037.041	814.894.873	1,845%	Sanagt Kurang

2016	16.263.067	1.008.168.410	1,613%	Sangat Kurang
2017	18.450.267	1.126.563.468	1,638%	Sangat Kurang
Rata-rata			2,828%	Sangat kurang

Sumber: data olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel 4.4 tentang rasio desentralisasi fisik keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017, dapat di ketahui bahwa setiap tahunnya rasio keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuatif yaitu tahun 2011 sebesar 4,688%, 2012 sebesar 2,898%, tahun 2013 sebesar 5,121%, tahun 2014 sebesar 1,995%, tahun 2015 sebesar 1,845%, tahun 2016 sebesar 1,613% dan pada tahun 2017 sebesar 2,898%. Dengan rata-rata rasio desentralisasi fisik sebesar 5,121% dan berdasarkan kriteria rasio derajat desentralisasi fisik berada pada pola interval 0,00-10,0 (sangat kurang).

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian, rasio efektivitas keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2011-2017

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio	Tingkat efektif
2011	491.436.056	556.912.412	88,243%	Cukup efektif
2012	538.096.539	591.871.356	90,914%	Efektif
2013	626.577.305	782.595.285	80,064%	Cukup efektif
2014	643.149.404	757.449.182	84,910%	Cukup efektif
2015	814.894.873	883.248.764	92,261%	Efektif
2016	1.008.168.410	1.093.581.486	92,190%	Efektif
2017	1.126.563.468	1.235.363.173	91,193%	Efektif
Rata-rata			88,539%	Cukup efektif

Sumber: data olahan penulis 2020

Berdasarkan tabel 4.5 tentang rasio efektivitas keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017, dapat di ketahui bahwa setiap tahunnya rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuatif yaitu tahun 2011 sebesar 88,243%, 2012 sebesar 90,914%, tahun 2013 sebesar 80,064%, tahun 2014 sebesar 84,910%, tahun 2015 sebesar 92,261%, tahun 2016 sebesar 92,190% dan pada tahun 2017 sebesar 91,193%. Dengan rata-rata rasio desentralisasi fisik sebesar 88,539% dan berdasarkan kriteria rasio derajat desentralisasi fisik berada pada pola interval 80%-90% (cukup efektif).

Rasio Efisiensi Keuangan daerah

Rasio efisiensi merupakan pengukuran tingkat seberapa efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan dengan membandingkan input yang digunakan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Berdasarkan penelitian, tingkat efisiensi Kabupaten Nias Selatan di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2011-2017

Tahun	Belanja (pengeluaran)	Pendapatan	Rasio	Tingkat Efisien
2011	479.421.887	491.436.056	97,555%	Kurang Efisien
2012	621.171.483	538.096.539	115,439%	Tidak Efisien
2013	669.036.416	626.577.305	106,776%	Tidak Efisien
2014	719.011.173	643.149.404	111,795%	Tidak Efisien
2015	855.251.720	814.894.873	104,952%	Tidak Efisien
2016	810.002.785	1.008.168.410	80,344%	Cukup Efisien
2017	1.074.527.745	1.126.563.468	95,381%	Kurang Efisien
Rata-rata			101,749%	Tidak Efisien

Sumber: data olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel 4.6 rasio efisiensi keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017, maka penulis membuat kesimpulan bahwa setiap tahunnya rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuatif yaitu tahun 2011 sebesar 97,555%, 2012 sebesar 115,439%, tahun 2013 sebesar 106,776%, tahun 2014 sebesar 111,795%, tahun 2015 sebesar 104,952%, tahun 2016 sebesar 80,344% dan pada tahun 2017 sebesar 95,381%. Dengan rata-rata rasio desentralisasi fisik sebesar 101,749% dan berdasarkan kriteria rasio derajat desentralisasi fisik berada pada pola interval di atas 100% (tidak efisien).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kabupaten Nias Selatan, tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017 bahwa, jika di ukur dari analisis Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketegantang keungan daerah, dan rasio derajat desentralisasi fisik, menunjukkan Kabupaten Nias Selatan selama periode 7 (tujuh) tahun dari tahun 2011-2017 masih kurang mampu dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah, menunjukkan Kabupaten Nias selatan selama periode 2011-2017 memiliki rata-rata 88,539%. Jika dibandingkan dengan kemampuan

keuangan daerah berada pada interval 80%-90% yang cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Begitu juga dengan rasio efisiensi keuangan daerah, menunjukkan Kabupaten Nias Selatan selama periode 2011-2017 memiliki rata-rata sebesar 101,749%. Jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah berada pada pola interval diatas 100% (tidak efisien) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarini. 2010. Otonomi Daerah. Jakarta Timur: CV GHINA WALAFABA
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. *Pengukuran Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan. *Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2018*. CV New Creative
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP YKPN
- Halim, Abdul. 2002. *Akutansi sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Pengolaan Keuangan Daerah*. Penerbit : UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010 *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Kamaroellah, R Agus, 2017. *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Derah*. *Jurnal Nuasa*. Vol 14 No 1)
- Sanny, Wurangian, 2013. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Tomoho*. *Jurnal Ilmiah Efisiensi*, Volume 17:64-78)
- Savitry, Ermhita. 2011. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonom Daerah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 4;23-34).
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jakarta. Direktorat jenderal otonomi daerah.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Direktor Jenderal Otonomi Daerah.
- Widjaja, 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT GRAFINDO Persada.
- Yulianti. 2016. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN

Zai, Nias Tivis. 2018 Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Atonomi Daerah Kabupaten Nias Barat . *Skripsi*: Program S-1 STIE Nias Selatan.